

Membayar Utang Merampas Masa Depan

Rabu, 06 April 2005

Oleh Peter Rosler Garcia

BAGIAN terbesar utang luar negeri Indonesia berasal dari koruptor Indonesia dan mungkin juga dari rencana strategis Amerika Serikat yang dibongkar belum lama berselang. Namun, beberapa minggu lalu Argentina sudah mendapat penghapusan utang luar negeri yang luar biasa besar. Bisakah Indonesia mengikuti contoh Argentina itu? Jika tidak, adakah jalan lain untuk Indonesia?

Dengan >small 0< 190 miliar dollar AS, utang total Indonesia sudah melebihi produk domestik bruto (PDB) yang di tahun 2004 bertumbuh menjadi 182 miliar dollar AS. Jumlah utang itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah (78,7 miliar dollar AS), utang luar negeri BUMN (4,8 miliar dollar AS), utang luar negeri swasta (45,5 miliar dollar AS), dan utang pemerintah dalam negeri (kira-kira 60 miliar dollar AS).

Setiap tahun pembayaran pokok dan bunga utang luar dan dalam negeri memakan hampir separuh dari semua penerimaan pajak Pemerintah Indonesia. Sisanya tidak cukup untuk dana membangun negara RI serta untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan, dan keadaan kehidupan bangsa. Sesuai dengan angka-angka Bank Dunia, kira-kira 60 persen dari semua penduduk Indonesia miskin atau di ambang garis kemiskinan. Apakah mungkin negara bisa maju dalam situasi itu?

Membayar utang negara kepada luar negeri berarti merampas masa depan Indonesia. Membayar semua utang luar negeri menjadi perbuatan jahat terhadap kaum muda dan generasi-generasi berikut bangsa Indonesia. Hanya dari segi itu, tiada pemerintah luar negeri atau lembaga multinasional yang bisa menentang hak Indonesia atas pengurangan utang luar negeri yang cukup besar. Tetapi, juga ada dua alasan lain, yaitu korupsi Orde Baru dan rencana strategis AS untuk menaikkan beban utang negara berkembang dan ketergantungan perekonomian mereka kepada luar negeri yang berjalan sejak masa Orde Baru.

Bangsa Indonesia dan pemimpin-pemimpin Indonesia masa kini tidak bertanggung jawab atas korupsi besar Orde Baru dan juga tidak atas utang yang berasal dari korupsi itu. Bagian terbesar utang Indonesia terhadap luar negeri berasal dari masa itu. Terkenal sekali nama-nama semua pemimpin dan pegawai negara Orde Baru yang menjadi kaya raya dalam jabatan mereka, antara lain, melalui uang dari perusahaan swasta yang mau menerima pesanan negara atau BUMN besar. Sementara tuntutan dan pengadilan para koruptor yang diberitakan pers itu pun terkatung-katung.

MENDAPAT uang korupsi lebih gampang lagi jika pembiayaan datang dari bank-bank multinasional. Dulu di sana harga-harga proyek tidak diperiksa dengan teliti. Sebagian uang bank multinasional ditransfer oleh perusahaan swasta kepada rekening si pegawai Indonesia di Singapura atau Swiss, misalnya, setelah mendapat pesanan. Sampai juga ada proyek yang hanya diciptakan untuk memuaskan ketamakan pegawai korup.

Dengan begitu, semua harga proyek, semua argumentasi penciptaan proyek masa Orde Baru sebenarnya harus diperiksa lagi. Tentu saja, usulan itu kurang realistis. Banyak tokoh korup sudah pensiun dan bukti tiada lagi. Juga, kolusi mitra dari beberapa negara sangat sulit bisa dibuktikan. Dan apa yang terjadi dengan pinjaman uang baru yang dipakai untuk membayar utang lama? Yang adil hanya satu: Memotong sebagian terbesar atau semuanya utang Orde Baru dan juga utang baru yang mengganti utang Orde Baru.

Korupsi Orde Baru sudah mendapat pasangan di luar negeri yang melengkapinya. Sesuai dengan buku *Confessions of an Economic Hit Man* (Pengakuan Seorang Preman Ekonomi), bekas anggota dinas rahasia

khusus AS John Perkins menuliskan kegiatannya di Indonesia tahun 1971. Jika isi buku itu benar, terbaca ada rencana strategis AS untuk menaikkan ketergantungan perekonomian negara berkembang melalui jumlah besar pinjaman luar negeri. Di samping itu, kegiatan mereka menguntungkan perusahaan besar AS yang mendapat banyak pesanan besar.

Kelompok "Preman Ekonomi" semacam John Perkins melaksanakan rencana AS itu. Sebagai penasihat resmi mereka menipu negara berkembang, supaya negara itu menerima pinjaman-pinjaman besar yang kemudian dikirimkan ke perusahaan swasta AS dalam bentuk pesanan. Pinjaman itu berasal dari pemerintah (misalnya USAID) atau dari bank dan lembaga multinasional. Antara lain alat mereka adalah laporan pembiayaan yang bersifat menipu, pemilihan umum yang dipalsukan, pembayaran uang suap, pemerasan, seks, dan pembunuhan tokoh negara berkembang yang tidak mau bekerja sama (Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, ISBN 1-57675-301-8).

SAMPAI sekarang Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Asian Development Bank dikuasai oleh negara maju. IMF, misalnya, tidak hanya suka mendikte penghematan yang terlalu tegas dan kurang peduli kepada keadaan kehidupan dan sosial bangsa. Juga ada contoh resep lembaga itu membunuh si sakit, misalnya, dalam kasus Argentina. Dan juga, banyak kali IMF bekerja sama sampai berkolusi dengan pemimpin negara korup atau mahakorup. Contohnya juga Argentina, yaitu pemerintah korup Presiden Menem.

Saat ini Argentina bisa bersorak-sorai. Lebih dari tiga perempat kreditor swasta negara itu sudah memotong 70 persen dari utang negara sebesar 100 miliar dollar AS. Itulah pertama kali dalam sejarah suatu negara mendapat penghapusan utang luar negeri yang begitu besar. Tentu saja, para kreditor swasta tidak melepaskan uang mereka secara sukarela. Mereka tidak punya pilihan yang lain: Pemerintah Argentina tidak mau berkompromi dan tiada pemerintah luar negeri yang mau mendukung kreditor swasta tersebut.

Di sinilah terletak perbedaan yang paling besar antara Argentina dan Indonesia. Hampir semua utang Pemerintah Indonesia terhadap luar negeri, yaitu 94 persen dari 78,7 miliar dollar AS, terdiri dari pinjaman pemerintah luar negeri atau pinjaman lembaga dan bank multinasional. Lain di Argentina, di mana obligasi negara yang dibeli oleh bank-bank dan investor swasta berjumlah dua pertiga utang luar negeri. Dan posisi seorang investor swasta luar negeri lemah sekali jika pemerintahnya tidak berbuat apa pun.

Kebanyakan kreditor luar negeri Argentina adalah warga negara AS, Italia, dan Jerman. Pemerintah AS tidak mau turun tangan oleh karena mereka takut ada bahaya radikalisme dan Presiden Argentina bisa mengikuti jejak Presiden Venezuela. Pemerintah Italia menuduh bank-bank swasta menjualkan obligasi Argentina kepada penabung-penabung kecil Italia waktu bank itu sudah tahu Argentina akan runtuh. Itu alasannya Pemerintah Italia memilih tidak berpihak.

Pemerintah lain, misalnya, Jerman dan Spanyol, sangat sadar bahwa Argentina tidak pernah bisa membayar utang luar negeri yang begitu besar tanpa pengorbanan sosial yang mahatinggi. IMF, yang ikut bertanggung jawab atas kemelut ekonomi Argentina, juga memilih tutup mulut.

Kreditor luar negeri Indonesia paling besar adalah Jepang (20,6 miliar dollar AS), IMF (9,4 miliar dollar AS), Bank Dunia (8,8 miliar dollar AS), dan Asian Development Bank (8,5 miliar dollar AS). Mereka bukan investor swasta. Itu alasannya Indonesia tidak bisa mengikuti jejak Argentina. Namun, demi keadilan dan demi masa depan negara, Pemerintah Indonesia tidak bisa lain dari berunding dengan semua kreditor bilateral dan multilateral negara dengan maksud mendapat potongan utang luar negeri yang harusnya masih lebih besar dari Argentina.

Peter Rosler Garcia *Ahli Politik dan Ekonomi Luar Negeri, Hamburg, Jerman*

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/06/opini/1659895.htm>